BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaannya dapat mengungkapkan apa yang dimaksudkan untuk diukur (Ghozali, 2013). Dasar pengambilan uji validitas dengan cara membandingkan r hitung dengan r tabel sebagai berikut:

1. Jika nilai r hitung $>$ r tabel maka variabel dinyatakan valid
2. Jika nilai r hitung $<$ r tabel maka variabel dinyatakan tidak valid

Hasil r hitung dibandingkan dengan r tabel dimana $N = 100$ dengan sig. 5% yaitu didapat r tabel sebesar 0,195. Nilai r hitung dalam uji validitas dapat dilihat pada tabel 4.1 yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Hasil Uji Nilai r Hitung

No	Variabel dan Indikator	r hitung	r tabel	Ket.
1	Kepatuhan Wajib Pajak			
	Indikator 1	0,780	0,195	Valid
	Indikator 2	0,833	0,195	Valid
	Indikator 3	0,824	0,195	Valid
	Indikator 4	0,586	0,195	Valid
	Indikator 5	0,843	0,195	Valid
2	Indikator 6	0,843	0,195	Valid
	Perubahan Tarif Pajak Penghasilan			
	Indikator 1	0,853	0,195	Valid
	Indikator 2	0,855	0,195	Valid
	Indikator 3	0,851	0,195	Valid
3	Indikator 4	0,848	0,195	Valid
	Persepsi Korupsi Pajak			
	Indikator 1	0,646	0,195	Valid

	Indikator 2	0,782	0,195	Valid
	Indikator 3	0,580	0,195	Valid
	Indikator 4	0,574	0,195	Valid
4	Kesadarn Wajib Pajak			
	Indikator 1	0,699	0,195	Valid
	Indikator 2	0,843	0,195	Valid
	Indikator 3	0,824	0,195	Valid
	Indikator 4	0,873	0,195	Valid
	Indikator 5	0,778	0,195	Valid
	Indikator 6	0,794	0,195	Valid
	Indikator 7	0,847	0,195	Valid

Sumber: Data Olahan SPSS 29

Dalam tabel hasil r hitung di atas, dapat dilihat bahwa semua indikator dalam kuesioner dinyatakan valid. Suatu pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid apabila memiliki nilai r hitung lebih besar dari pada nilai r tabel. Karena nilai r hitung $>$ r tabel, maka seluruh pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid dan layak untuk dijadikan instrumen dalam penelitian ini.

4.1.2 Hasil Uji Reliabilitas

Menurut Umar (2019) uji reliabilitas menunjukkan seberapa konsisten suatu alat pengukuran dalam mengukur gejala yang ada. Setiap alat pengukuran seharusnya memiliki kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran yang konsisten. Untuk mengetahui seberapa andal alat ukur secara statistika, yaitu melalui koefisien reliabilitas. Jika koefisien reliabilitasnya lebih besar dari 0,70, maka pernyataan tersebut secara keseluruhan dinyatakan reliabel.

Pengelolaan data menggunakan program SPSS versi 29 yang hasilnya disajikan dibawah ini:

Tabel 4. 2 Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel dan Indikator	Cronbach's Alpha	Standart Reliabilitas	Ket.
1	Kepatuhan Wajib Pajak	0,870	0,70	Reliabel
2	Perubahan Tarif Pajak	0,873	0,70	Reliabel

Penghasilan				
3	Persepsi Korupsi Pajak	0,530	0,70	Tidak Reliabel
4	Kesadaran Wajib Pajak	0,909	0,70	Reliabel

Sumber: Data Olahan SPSS 29

Dari hasil uji reliabilitas untuk variabel persepsi korupsi pajak tidak reliabel, karena memiliki Cronbach's alpha lebih kecil dari standart reliabel yaitu $0,530 < 0,70$ dengan 4 item pertanyaan. Data yang tidak reliabel itu maka harus dihapus dan dilakukan uji reliabilitas ulang. Berikut hasil ulang uji reliabilitas dengan menghapus 1 pertanyaan yaitu dengan membuang pertanyaan nomor 1 menjadi:

Tabel 4.2. 1 Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
0,465	3

Dapat dilihat bahwa masih dibawah standart reliabilitas, maka di uji lagi dengan menghapus 2 pertanyaan yaitu nomor 1 dan 2 menjadi:

Tabel 4.2. 2 Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
0,408	2

Dapat dilihat juga bahwa hasil masih kurang dari standart reliabilitas, maka dilakukan uji ulang dengan membuang nomor 4 dan nomor 1 dan 2 di pergunakan lagi dan menjadi:

Tabel 4.2. 3 Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
0,530	3

Dapat dilihat bahwa hasil masih kurang dari standart reliabilitas, maka dilakukan uji ulang dengan membuang nomor 3 dan 4, dan hanya menggunakan nomor 1 dan 2 menjadi:

Tabel 4.2. 4 Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
0,762	2

Dapat dilihat bahwa hasil sudah reliabel dengan membuang 2 item pertanyaan diatas, maka uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel

Tabel 4. 3 Uji Reliabilitas

No	Variabel dan Indikator	Cronbach's Alpha	Standart Reliabilitas	Ket.
1	Kepatuhan Wajib Pajak	0,870	0,70	Reliabel
2	Perubahan Tarif Pajak Penghasilan	0,873	0,70	Reliabel
3	Persepsi Korupsi Pajak	0,762	0,70	Tidak Reliabel
4	Kesadaran Wajib Pajak	0,909	0,70	Reliabel

Sumber: Data Olahan SPSS 29

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak, perubahan tarif pajak penghasilan, dan kesadaran wajib pajak memiliki nilai koefisien Alpha cukup besar, sehingga dapat dinyatakan semua reliabel.

4.1.3 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui karakteristik dan tanggapan responden terhadap masing-masing pernyataan. Seluruh variabel dideskripsikan dengan menggunakan nilai rata-rata. Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Statistik Deskriptif

Variabel Penelitian	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	100	6	30	22,49	5,473

Perubahan Tarif					
Pajak	100	12	20	14,84	2,164
Penghasilan					
Persepsi Korupsi					
Pajak	100	2	10	5,37	2,053
Kesadaran wajib pajak					
	100	15	35	26,51	3,891

Sumber: Data Olahan SPSS 29

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa total sampel yang digunakan adalah 100 responden. Hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel perubahan tarif pajak penghasilan memiliki nilai minimum sebesar 12 dan nilai maksimum sebesar 20. Variabel perubahan tarif pajak penghasilan yang diukur dengan 4 item pernyataan dengan pengukuran skala likert 5 poin memiliki nilai rata-rata sebesar 14,84 sedangkan nilai standar deviasi sebesar 2,164. Hal ini berarti standar deviasi lebih rendah dari nilai rata-rata yang artinya bahwa sebaran jawaban responden terkait perubahan tarif pajak penghasilan sudah merata. Apabila nilai rata-rata 14,48 dibagi dengan 4 item pernyataan maka diperoleh nilai total rata-rata sebesar 3,62 yakni berada pada kriteria sesuai variabel ini yaitu setuju, berarti semua responden dalam penelitian setuju bahwa perubahan tarif pajak penghasilan meringankan beban pajak mereka, sudah adil dan tidak memberatkan serta menjadi lebih patuh menjalankan kewajiban perpajakannya.
2. Variabel persepsi korupsi pajak memiliki nilai minimum sebesar 2 dan nilai maksimum sebesar 10. Variabel persepsi korupsi pajak yang diukur dengan 2 item pernyataan dengan skala likert 5 poin memiliki nilai rata-rata sebesar 5,37, dengan nilai standar deviasi sebesar 2,053. Hal ini berarti nilai standar deviasi lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata, yang artinya sebaran jawaban responden terkait persepsi korupsi pajak sudah merata. Apabila nilai rata-rata 5,37 dibagi dengan 2 item pernyataan maka diperoleh nilai total rata-rata sebesar 2,685 yakni berada

pada kriteria netral. Berdasarkan Sugiyono sedangkan melihat ke pertanyaan kuesioner, berarti responden persepsinya tentang penggunaan uang penerimaan pajak di posisi netral, bisa jadi mereka takut untuk mengisi atau memang tidak pernah tau berita mengenai penggelapan pajak.

3. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 15 dan nilai maksimum sebesar 35. Variabel kesadaran wajib pajak yang diukur dengan 7 item pernyataan dengan skala likert 5 poin memiliki nilai rata-rata sebesar 26,51, dengan nilai standar deviasi sebesar 3,891. Hal ini berarti nilai standar deviasi lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata, yang artinya sebaran jawaban responden terkait kesadaran wajib pajak sudah merata. Apabila nilai rata-rata 26,51 dibagi dengan 7 item pernyataan maka diperoleh nilai total rata-rata sebesar 3,78 yakni berada pada kriteria setuju. Berarti semua responden dalam penelitian ini setuju bahwa mereka setuju pajak adalah memaksa dan wajib dilaksanakan karena akan digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan.
4. Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 6 dan nilai maksimum sebesar 30. Variabel kepatuhan wajib pajak yang diukur dengan 6 item pernyataan dengan skala likert 5 poin memiliki nilai rata-rata sebesar 22,49 dengan nilai standar deviasi sebesar 5,473. Hal ini berarti nilai standar deviasi lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata, yang artinya sebaran jawaban responden terkait kepatuhan wajib pajak sudah merata. Apabila nilai rata-rata 22,49 dibagi dengan 6 item pernyataan maka diperoleh nilai total rata-rata sebesar 3,74 yakni berada pada kriteria setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM sudah terlaksana dengan baik.

4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

Model regresi akan lebih tepat digunakan dan menghasilkan perhitungan yang lebih akurat, apabila beberapa asumsi dapat terpenuhi. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Uji prasyarat ini hanya digunakan pada analisis regresi linear berganda saja. Hasil uji normalitas pada tabel berikut:

4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual dari penelitian ini dibuat berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan menguji normalitas residual dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika probabilitas signifikan nilai residual lebih besar dari 0,05 maka data tersebut dikatakan berdistribusi normal. Demikian pula sebaliknya, jika probabilitas signifikan residual lebih rendah dari 0,05 maka data tersebut dikatakan tidak berdistribusi normal. $0,200 > 0,05$ yang artinya data berdistribusi normal.

Tabel 4. 5 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardize Residual
N		100
Normal Parameters	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.7375845
Most Extreme Differences	Absolute	.053
	Positive	0.37
	Negative	-.053
Kolmogorov – Smirnov Z		156
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Data Olahan SPSS 29

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4.5, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini terdistribusi normal.

4.2.2 Uji Multikolinearitas

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas dalam model regresi. Model regresi yang baik menunjukkan bahwa tidak ada korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai tolerance lebih dari 0,1 atau VIF kurang dari 10, maka dapat dikatakan model telah bebas dari

multikolinearitas. Adapun uji multikolinearitas pada penelitian ini dapat dilihat pada table 4.6 berikut:

Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Ket.
Perubahan Tarif Pajak Penghasilan (X1)	0,560	1,786	Bebas Multikolinearitas
Persepsi Korupsi Pajak (X2)	0,935	1,070	Bebas Multikolinearitas
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0,564	1,773	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Data Olahan SPSS 29

Berdasarkan table 4.6 dapat dilihat tolerance dan VIF dari seluruh variabel tersebut menunjukkan bahwa nilai tolerance untuk setiap variabel lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 yang berarti model persamaan regresi bebas dari multikolinearitas.

4.2.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain yang dilakukan dengan uji Glejser. Model regresi yang baik adalah yang tidak mengandung gejala heterokedastisitas atau mempunyai varians yang homogen. Jika variabel bebas yang diteliti tidak mempunyai pengaruh signifikan atau nilai signifikannya lebih dari 0,05 terhadap nilai absolute residual, berarti model regresi tidak mengandung gejala heterokedastisitas. Hasil pengujian heterokedastisitas disajikan pada table 4.7 berikut:

Tabel 4. 7 Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,672	2,823		2,363	0,20
X1	-0,100	0,197	-0,67	-0,507	0,613
X2	0,160	0,111	0,147	1,435	0,155
X3	-0,180	0,109	-0,131	-0,992	0,324

Sumber: Data Olahan SPSS 29

Pada tabel 4.7 di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari variabel perubahan tarif pajak penghasilan sebesar 0,613, persepsi korupsi pajak sebesar 0,155, dan kesadaran wajib pajak sebesar 0,324. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap absolute residual. Dengan demikian, model yang dibuat tidak mengandung gejala heterokedastisitas.

Berdasarkan uraian pada tabel 4.5, tabel 4.6 dan tabel 4.7 di atas, menunjukkan bahwa semua uji asumsi klasik sudah terpenuhi sehingga hasil analisis regresi layak untuk dibahas lebih lanjut.

4.3 Uji Hipotesis

4.3.1 Hasil Uji t (Uji Parsial)

Pengaruh variabel perubahan tarif pajak penghasilan, persepsi korupsi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang diuji dengan menggunakan uji t. Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai signifikan pada tabel Coefficients. Biasanya dasar pengujian hasil regresi dilakukan dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau dengan taraf signifikannya sebesar 5% ($\alpha = 0,05$). Adapun kriteria dari uji statistik t (Ghozali, 2016):

1. Jika nilai signifikansi uji t $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi uji t $< 0,05$ maka H_0 ditolak H_a diterima. Artinya

terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 8 Hasil Uji t (Uji Parsial)

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	38,369	2,391		16,044	0,000
X1	-1,362	0,122	-0,970	-11,160	0,000
X2	-0,402	0,115	-0,217	-3,494	0,001
X3	0,353	0,108	0,284	3,263	0,002

Sumber: Data Olahan SPSS29

1. Pengaruh perubahan tarif pajak penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis pengaruh perubahan tarif pajak penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ mengindikasikan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa perubahan tarif pajak penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka hipotesis pertama diterima.
2. Pengaruh persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai signifikan sebesar 0,001. Nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ mengindikasikan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa persepsi korupsi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka hipotesis kedua diterima.
3. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai signifikan sebesar 0,002. Nilai signifikansi $0,002 > 0,05$ mengindikasikan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa kesadaran wajib pajak terdapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka hipotesis ketiga diterima.

4.3.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui dan mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Peneliti menggunakan nilai adjusted R^2 pada saat mengevaluasi yang mana model regresi terbaik, karena tidak seperti R^2 , nilai adjusted R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

Tabel 4. 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,802	0,643	0,632	3,321

Sumber: Data Olahan SPSS 29

Hasil uji pada tabel 4.10 memberikan hasil dimana diperoleh besarnya adjusted R^2 (koefisien determinasi yang telah disesuaikan) adalah sebesar 0,632. Ini berarti variasi kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel perubahan tarif pajak penghasilan, persepsi korupsi pajak, dan kesadaran wajib pajak sebesar 63,2 persen, sedangkan sisanya sebesar 36,8 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model penelitian.

4.4 Analisis Linear Berganda

Menurut (Ghozali, 2019) analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua atau lebih variabel, serta arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Analisis ini juga diperlukan untuk mengetahui koefisien dan signifikansi regresi sehingga dapat digunakan untuk menjawab hipotesis yang ada. Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel 4.11 dibawah ini.

Tabel 4. 10 Hasil Uji Analisis Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	38,369	2,391		16,044	0,000
X1	-1,362	0,122	-0,970	-11,160	0,000
X2	-0,402	0,115	-0,217	-3,494	0,001
X3	0,353	0,108	0,284	3,263	0,002

Sumber: Data Olahan SPSS 29

Berdasarkan tabel hasil analisis regresi linear berganda di atas dapat diperoleh persamaan berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + E$$

$$Y = 38,369 - 1,362 - 0,402 + 0,353 + E$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan wajib pajak

β_0 : Konstanta

β_1 : Koefisien regresi variabel perubahan tarif PPh

β_2 : Koefisien regresi variabel persepsi korupsi pajak

β_3 : Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak

X1 : Perubahan tarif PPh

X2 : Persepsi korupsi pajak

X3 : Kesadaran wajib pajak

E : Error

Berdasarkan hasil persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa:

1. Berdasarkan regresi variabel X1 (perubahan tarif pajak penghasilan) diperoleh sebesar -1,362 dengan tanda koefisien negatif. Hal ini berarti

bahwa cenderung semakin lemah pengaruh dari perubahan tarif pajak penghasilan, maka cenderung akan semakin rendah kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, semakin kuat pengaruh dari perubahan tarif pajak penghasilan, maka akan cenderung semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

2. Berdasarkan regresi variabel X2 (persepsi korupsi pajak) diperoleh sebesar -0,402 dengan tanda koefisien negatif. Hal ini berarti bahwa cenderung semakin lemah pengaruh dari persepsi korupsi pajak, maka cenderung akan semakin rendah kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, semakin kuat pengaruh dari persepsi korupsi pajak, maka akan cenderung semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.
3. Berdasarkan regresi variabel X3 (kesadaran wajib pajak) diperoleh sebesar 0,353 dengan tanda koefisien positif. Hal ini berarti bahwa cenderung semakin kuat pengaruh dari kesadaran wajib pajak, maka cenderung akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, semakin lemah pengaruh dari kesadaran wajib pajak, maka akan cenderung semakin rendah kepatuhan wajib pajak.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk menguji pengaruh dari variabel perubahan tarif pajak penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak, didapat bahwa nilai sig. sebesar 0,000, koefisien regresi variabel X1 (perubahan tarif pajak penghasilan) yang dihasilkan dari penelitian ini diperoleh sebesar -1,362 dengan tanda koefisien negatif. Hal ini berarti perubahan tarif pajak penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tanda koefisien negatif dari hasil analisis ini menunjukkan bahwa semakin turun atau semakin kecil tarif pajak penghasilan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Dengan demikian hipotesis 1 penelitian ini diterima.

Hal ini terjadi karena, berdasarkan data jawaban responden dari variabel perubahan tarif pajak yang dinilai berdasarkan indikator membayar tarif pajak UMKM sebesar 0,5% sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, tarif pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak rata-rata memperoleh jawaban netral dan

setuju. Hasil jawaban responden ini membuktikan bahwa teori yang dikemukakan oleh (Kirchler et al., 2008) menyatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh dua faktor yaitu, kekuatan otoritas (*power of authority*) dan kepercayaan terhadap otoritas (*trust in authority*). Dari hasil regresi di atas menunjukkan bahwa tarif pajak yang lebih rendah meningkatkan kepatuhan yang berarti wajib pajak menjadi lebih patuh karena merasa system pajak lebih adil. Maka, kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap otoritas (*trust in authority*).

Pada dasarnya, wajib pajak akan lebih cenderung patuh terhadap kewajibannya, terutama apabila tarif pajak yang dikenakan relatif kecil atau apabila mereka memperoleh berbagai fasilitas dan insentif perpajakan. Kondisi ini menciptakan persepsi bahwa sistem perpajakan bersifat adil dan tidak memberatkan, sehingga meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Kepercayaan inilah yang mendorong terbentuknya kepatuhan sukarela, di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya bukan lagi karena tekanan atau ancaman sanksi, melainkan karena adanya rasa tanggung jawab. Hasil dari penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh Yusro dan Kiswanto (2014); Fadilah dan Noermansyah (2021) menyatakan bahwa perubahan tarif pajak penghasilan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.5.2 Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang dilakukan untuk menguji pengaruh variabel persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, diperoleh nilai signifikan sebesar 0,001 yang menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, nilai koefisien regresi untuk variabel persepsi korupsi pajak (X_2) adalah -0,402 dengan tanda negatif. Nilai koefisien negatif ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap adanya praktik korupsi dalam administrasi perpajakan memiliki hubungan negatif terhadap kepatuhan pajak. Dengan kata lain, semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap adanya korupsi di lingkungan perpajakan, maka Tingkat kepatuhan wajib pajak cenderung semakin menurun.

Temuan ini sejalan dengan teori *Slippery Slope* yang dikemukakan oleh (Kirchler et al., 2008), yang menjelaskan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh kekuatan otoritas pajak (*power of authority*), tetapi juga oleh kepercayaan (*trust*) wajib pajak terhadap institusi perpajakan. Ketika wajib pajak memiliki persepsi bahwa aparat atau institusi perpajakan terlibat dalam praktik korupsi, maka kepercayaan terhadap sistem perpajakan akan menurun. Penurunan kepercayaan ini dapat menyebabkan turunya kepatuhan sukarela (*voluntary Compliance*) dan mendorong peningkatan ketidakpatuhan. Dengan demikian, tingginya persepsi korupsi pajak menjadi salah satu faktor yang dapat mengikis kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh Lestari et al (2023); Ginting et al (2016); Herlina dan Rodiah (2024) yang menyatakan bahwa persepsi korupsi pajak dinilai berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.5.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diketahui bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X3) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,353 dengan tanda koefisien positif. Nilai koefisien yang positif ini mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil ini didukung oleh data jawaban responden pada variabel kesadaran wajib pajak yang dinilai berdasarkan beberapa indikator, antara lain pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan serta kesadaran terhadap fungsi pajak sebagai kontribusi untuk pembangunan negara. Rata-rata responden memberikan jawaban pada kategori "netral" dan "setuju", yang menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak telah memiliki tingkat kesadaran yang cukup dalam memahami pentingnya membayar pajak. Respons ini memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Temuan ini selaras dengan teori *Slippery Slope* yang dikemukakan oleh (Kirchler et al., 2008), yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu kekuasaan otoritas pajak (*power of authority*) dan

kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak (*trust in tax authority*). Kesadaran wajib pajak dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk *internal trust* yang tumbuh dari pemahaman dan penerimaan individu terhadap fungsi dan manfaat pajak. Ketika wajib pajak memiliki pemahaman yang baik dan kesadaran yang tinggi mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan negara, maka secara tidak langsung akan meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan mereka dalam sistem perpajakan secara sukarela (*voluntary compliance*).

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak menjadi salah satu aspek penting dalam mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Dalam konteks teori *Slippery Slope*, hal ini mencerminkan pentingnya membangun kepercayaan dan pemahaman sebagai strategi jangka panjang untuk mencapai kepatuhan pajak yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian Utami (2020); Maghriby dan Ramdani (2020); Majidah et al (2020) dan F. A. Riadita dan Saryadi (2019) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.